



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS TIDAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOOR FARID
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 694185

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.145.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m<sup>2</sup>/65 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 263 m<sup>2</sup>/74 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m<sup>2</sup>/170 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, WARISAN Rp. 25.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 264.200.000**

1. MOBIL, SUZUKI FORSA Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
4. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000



6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
4.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.199.160

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.481.399.160

III. HUTANG Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.451.399.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.